

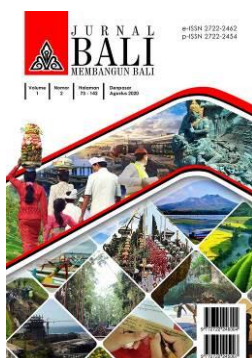


Pemetaan Konflik Daerah Berbasis Digital untuk Menunjang Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Bali

I Gede Yudhi Permadi Kusuma¹, I Wayan Mardiana²

^{1,2}Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

E-mail : ¹yudhipermadikusuma@rocketmail.com , ²yanmardiana95@gmail.com



Sejarah Artikel

Diterima pada
23 September 2023

Direvisi pada
26 Oktober 2023

Disetujui pada
27 November 2023

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tata cara pemetaan konflik sosial di daerah berbasis digital untuk menunjang penanganan konflik sosial di Provinsi Bali.

Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan. Data yang digunakan adalah data observasi dan studi dokumen terhadap beberapa sumber yang tersedia, seperti jurnal, laporan-laporan, dan buku-buku yang terkait.

Hasil dan pembahasan: Penerapan teknologi informasi dengan pembuatan Sistem Informasi Peta Konflik (SIPELIK) dapat membantu pemetaan potensi konflik yang ada di Provinsi Bali yang dapat berupa database pengelolaan data konflik. Sistem ini akan memberikan solusi pengumpulan data konflik yang dapat dilakukan secara real time dan lebih lengkap.

Implikasi: SIPELIK dapat berperan dalam pengelolaan data konflik di Provinsi Bali sehingga dapat membantu mencegah dari adanya konflik di daerah.

Kata Kunci: peta konflik, SIPELIK, sistem informasi

Abstract

Purpose: This research was conducted to analyze the procedures for mapping social conflict in digital-based areas to support the handling of social conflict in the Province of Bali.

Research methods: This research is a qualitative research based on the results of the literature study conducted. The data used are data obtained through observation and document study from several available sources, such as related journals, reports, and books.

Results and discussion: The application of information technology with the creation of Sistem Informasi Peta Konflik or SIPELIK (i.e. Conflict Map Information System) can help mapping potential conflicts in the Province of Bali which can be in the form of a conflict data management database. This system will provide a solution for collecting conflict data that can be done in real time and is more complete.

Implications: SIPELIK can play a role in managing conflict data in the Province of Bali so that it can help prevent conflicts in the regions.

Keywords: conflict map, SIPELIK, information system.

PENDAHULUAN

Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik dilangsungkan tidak hanya sekadar untuk mempertahankan

hidup dan eksistensi tetapi juga bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

Konflik selalu mewarnai kehidupan mulai dari konflik yang sangat kecil sampai yang sangat besar. Konflik terjadi akibat perbedaan persepsi, berlainan pendapat dan karena ketidaksamaan kepentingan. Konflik ada yang bisa diselesaikan secara tuntas, ada yang setengah tuntas, dan ada juga yang berlarut-larut tanpa solusi. Manajemen konflik adalah proses mengidentifikasi dan menangani konflik secara bijaksana, adil dan efisien dengan tiga bentuk metode pengelolaan konflik stimulasi konflik, pengurangan/penekanan konflik dan penyelesaian konflik. Pengelolaan konflik membutuhkan keterampilan seperti berkomunikasi yang efektif, pemecahan masalah, dan secara *functional* dapat mendorong meningkatkan produktivitas apabila konflik tersebut dapat dikelola dengan baik. Namun konflik biasanya sebagai sesuatu yang salah (*dysfunctional*) yang dapat merusak dan menyebabkan produktivitas menurun. Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat, karena konflik mempertegas identitas-identitas dalam kelompok dan membentuk dasar stratifikasi sosial (Rosana, 2015).

Sukardi (2016) menjelaskan bahwa istilah konflik itu sendiri seringkali diartikan sebagai lawan kata dari pengertian keserasian, kedamaian, dan keteraturan. Konflik seringkali diasosiasikan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pandangan yang sempit mengenai konflik yang demikian, tidak mudah untuk diubah. Munculnya budaya “mencegah konflik”, “meredam konflik”, dan anggapan bahwa berkonflik adalah “berkelahi” bukanlah sesuatu yang relevan untuk kondisi saat ini. Konflik bukanlah sesuatu yang dapat dihindari atau disembunyikan tetapi harus diakui keberadaannya, dikelola, dan diubah menjadi suatu kekuatan bagi perubahan positif.

Konflik berasal dari kata kerja Latin “configure” yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik adalah sesuatu yang wajar terjadi di masyarakat, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Mustamin (2016) menjelaskan bahwa konflik sosial adalah pertentangan antar-anggota atau antarkelompok dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh, yang di

sebabkan oleh adanya beberapa perbedaan, di antaranya, individu, pola budaya, status sosial, kepentingan dan terjadinya perubahan sosial.

Definisi di atas menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berarti kekerasan atau peperangan. Hal itu karena banyak konflik yang sebenarnya masih tersimpan dan belum muncul ke permukaan atau yang sering disebut sebagai konflik laten (tersembunyi). Bisa disimpulkan bahwa sekecil apapun perbedaan pendapat dalam masyarakat adalah suatu konflik, walaupun konflik ini belum begitu berdampak negatif kepada masyarakat. Namun demikian, jika hal ini tidak dikelola dengan baik dan benar, tidak menutup kemungkinan perbedaan pendapat bisa berubah menjadi konflik kekerasan. Setiap masyarakat memiliki cara pandang tersendiri atas konflik yang terjadi di lingkungannya. Cara pandang ini sangat tergantung pada kerangka konseptual umum, atau budaya masyarakat yang melingkupinya. Cara pandang yang berbeda-beda inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan makna konflik antara masyarakat yang satu dan lainnya, yang kemudian memunculkan mitos-mitos tentang konflik.

Pengelolaan data konflik menjadi hal yang sangat penting dalam melaksanakan manajemen konflik itu sendiri, karena data merupakan hal penting dalam proses pengolahan informasi. Tanpa data tidak akan ada informasi yang dapat disampaikan kepada khalayak luas. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data dapat diperoleh dalam bentuk simbol-simbol karakter huruf, angka, gambar, suara, sinyal, dan lain sebagainya. Agar dapat digunakan, data harus diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan terhadap data ini nantinya dapat menjadi informasi.

Pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, data juga merupakan hal yang sangat penting. Data merupakan dasar dari pengambilan keputusan dan penyusunan suatu kebijakan Pemerintah. Data yang dikumpulkan datang dari berbagai elemen, baik antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dari lapisan masyarakat. Data tersebut tentunya hal yang harus dapat disimpan dengan baik agar dapat senantiasa digunakan dan dimanfaatkan ketika dibutuhkan.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Data bukan hanya sebuah hal yang penting tetapi juga hal yang harus cepat di dapat. Kecepatan dan ketepatan data menjadi acuan dari tindakan yang akan dilakukan. Semakin cepat data yang didapat dan kemudian di olah semakin cepat pula informasi yang dapat diterima sehingga dapat memberikan manfaat positif kepada masyarakat. Selain itu teknologi informasi juga mengakomodasi sebuah data dapat tersimpan dengan baik, di laporkan secara satu waktu (*real time*) dan juga mempermudah proses pencarian arsip-arsip data.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam salah satu bidangnya yaitu Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik merupakan sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencegah dari terjadinya konflik sosial di Provinsi Bali sangat memerlukan kecepatan dan ketepatan penerimaan data khususnya data konflik yang dibagi dengan kategori antara lain sosial budaya, ekonomi, batas wilayah, suku dan agama. Data konflik tersebut juga memerlukan dukungan teknologi informasi agar dapat disimpan, dikategorisasi dan nantinya mempermudah untuk dicari sebagai keperluan untuk diolah menjadi informasi yang bermuara pada dasar penyusunan kebijakan.

Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam mendukung pengumpulan data konflik kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal tersebut tentunya belum mendukung arahan Pemerintah Provinsi Bali terkait dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menuju Bali Smart Island berlandaskan *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Data konflik tersebut diperlukan sebagai bahan dasar pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan terkait dengan kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik daerah. Pendataan data konflik secara manual sangat rentan terhadap kesalahan dan kehilangan dari data tersebut. Selain itu data yang diterima juga tidak secara langsung saat terjadinya konflik. Hal tersebut tentunya memiliki potensi munculnya permasalahan pendataan konflik yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Bali, seperti tumpang tindih data akibat dari pengiriman data yang tidak secara langsung, kurang akuratnya data yang diterima akibat dari kurang lengkapnya informasi yang diterima. Permasalahan tersebut jika dibiarkan terus menerus tentunya akan menimbulkan data yang tidak valid yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan atau dasar penyusunan suatu kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

Pengembangan sistem informasi dipandang penting sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, di sisi lain pengembangan sistem informasi juga merupakan bagian dari proses efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintah. Pengumpulan data yang semula di mana perlu memakan waktu dan biaya dapat diringkas dan permudah dengan adanya sistem informasi. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat dirumuskan tujuan dari penulisan artikel ini, yaitu untuk menganalisis tata cara pemetaan konflik sosial di daerah berbasis digital untuk menunjang penanganan konflik sosial di Provinsi Bali. Isi artikel meliputi riset, pengkajian, pengembangan, penerapan, invensi, dan inovasi pembangunan daerah terkait upaya peningkatan dan kemajuan pembangunan, peradaban, dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Menurut Moleong (2005: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Saryono (2010) menyatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang didapatkan melalui observasi, dan studi kepustakaan terhadap beberapa sumber yang tersedia, seperti jurnal, laporan-laporan, buku-buku yang terkait dan mendukung dari penelitian ini. Menurut Mestika Zed (2003), studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Sukardi (2021) menjelaskan, studi pustaka adalah dasar pijakan atau pondasi untuk membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara hipotesis penelitian.

Begitu banyak penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai konflik sosial dalam berbagai aspek dan perspektif keilmuan di Bali, di antaranya untuk menyebut beberapa saja, Dharmika (2019), Juniarta (2020), Kertih & Susila (2014), Kesumaningsari & Simarmata (2014), dan Sunu (2014) tetapi belum ada yang membahas tentang pemetaan konflik daerah berbasis digital untuk menunjang penanganan konflik sosial di Provinsi Bali. Untuk itu, hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan dan gambaran dari pemetaan konflik daerah berbasis digital untuk menunjang penanganan konflik sosial di Provinsi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap konflik sosial dalam masyarakat akan menimbulkan dampak terhadap tatanan baru baik itu positif maupun negatif. Keuntungan yang ditimbulkan konflik pasca resolusi tidaklah sama antara pihak-pihak yang terlibat. Perhitungan materi maupun non-materi merupakan dua hal yang mesti diperhitungkan setelah resolusi konflik terjadi. Adanya salah satu pihak yang merasa tidak diuntungkan dalam

perjanjian atau resolusi akan membawa kepada situasi baru. Situasi ini yang nantinya bisa membawa kepada tatanan baru antara kedua pihak. Pihak yang merasa tidak puas akan terus merasa dirugikan dan memperjuangkan keinginannya. Perjuangan tersebut yang nantinya akan mendapat tantangan dengan pihak lain, selanjutnya akan menimbulkan konflik baru antara kedua pihak tersebut (Trisno, et al., 2019).

Ada beberapa bentuk dan proses penyelesaian konflik yaitu menghindari (*avoidance*), pemecahan masalah secara informal (*informal problem solving*), bernegosiasi (*negotiation*), munculnya pihak ketiga yang mengadakan mediasi (*mediation*), kemunculan pihak lain yang memberikan bentuk penyelesaian (*executive dispute resolution approach*), pihak yang bertikai mencari pihak ketiga yang dipandang netral (*arbitration*), intervensi pihak berwenang dalam member kepastian hukum (*judicial approach*), dan penanganan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal (*extra legal approach*) (Rosana, 2015). Penyelesaian konflik sosial yang terjadi sangat ditentukan oleh bagaimana manajemen konflik sosial yang terjadi tersebut.

Arif (2014) menjelaskan bahwa manajemen konflik merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengatasi konflik. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, manajemen konflik diistilahkan sebagai penanganan konflik. Penanganan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup: (a). Pencegahan konflik, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Hal tersebut dilakukan dengan upaya pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. (b) Penghentian konflik, adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam proses penghentian konflik seperti penghentian dengan kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban dan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. (c). Pemulihan pascakonflik, adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

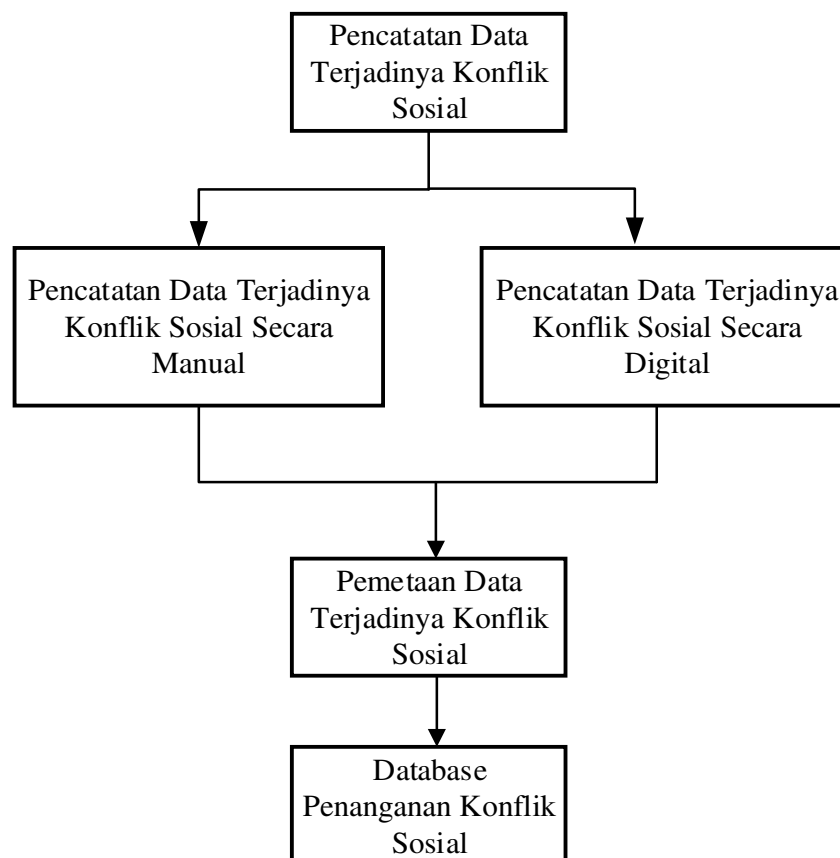
Banyak penyebab dari adanya konflik salah satunya adalah konflik yang terkait dengan budaya yang terjadi di Provinsi Bali. Oleh karena banyaknya, sebab konflik tersebut sangat penting untuk dilakukan pendataan dari adanya konflik tersebut.

Pendataan dari adanya konflik tersebut akan dapat menjadi suatu database dalam melakukan penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat dan memberikan suatu kebijakan yang dapat mengatasi suatu konflik sosial dengan lebih optimal. Dukungan sistem informasi akan sangat diperlukan dalam melakukan pendataan suatu konflik tersebut, kecepatan dalam menerima dan mengirim data-data konflik yang terjadi akan sangat menentukan dalam pengambilan kebijakan penanganan konflik yang harus diambil ke depannya.

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan munculnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Kemajemukan bangsa yang seharusnya dapat kondusif bagi pengembangan demokrasi ditenggelamkan oleh ideologi harmoni sosial yang serba semu, yang tidak lain adalah ideologi keseragaman. Kemajemukan pada dasarnya juga dapat berpotensi mengganggu stabilitas politik, jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu negara perlu menyeragamkan setiap elemen kemajemukan dalam masyarakat sesuai dengan karsanya, tanpa harus merasa telah mengingkari prinsip dasar hidup bersama dalam keberagaman. Dengan segala kekuasaan yang ada padanya negara tidak segan-segan untuk menggunakan cara-cara koersif agar masyarakat tunduk pada ideologi negara yang maunya serba seragam, serba tunggal. Perlakuan Negara yang demikian diapresiasi dan diinternalisasi oleh masyarakat dalam kesadaran sosial politiknya. Pada gilirannya kesadaran yang bias state itu mengarahkan sikap dan perilaku sosial masyarakat kepada hal-hal yang bersifat diskriminatif, kekerasan, dan dehumanisasi (Sukardi, 2016).

Suardita & Krisnawati (2015) menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Bali dari waktu ke waktu terus mengalami dinamika. Dinamika perkembangan masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh era globalisasi yang memunculkan arus demokrasi dan perubahan yang begitu luas dan mempengaruhi segala segi kehidupan masyarakat Bali. Era globalisasi yang menimbulkan dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya terhadap masyarakat Bali telah memunculkan pertentangan atau konflik di Bali, yaitu konflik yang bersifat horisontal atau vertikal. Irwandi (2017) menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Sosialisasi dimaksudkan agar memudahkan seseorang atau sekelompok orang dalam memahami sesuatu hal. Proses sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik dapat mengakibatkan pemahaman atau persepsi orang terhadap suatu hal tersebut akan berbeda-beda (multipersepsi). Konflik merupakan gejala sosial yang akan selalu ada karena adanya hubungan sosial yang terjadi baik di tingkat individu atau di tingkat kelompok (Munandar, 2019).

Pencegahan dari terjadinya konflik akan sangat berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Bali, dalam upaya mencegah suatu konflik terjadi, sangat perlu adanya suatu database yang berisi peta potensi konflik yang akan terjadi nantinya. Data base tersebut akan sangat bermanfaat jika diolah melalui suatu sistem informasi yang dapat memberikan gambaran potensi terjadinya konflik secara cepat, tepat dan realtime setelah dilakukan pencatatan dari konflik itu sendiri. Pengembangan sistem informasi dipandang penting sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, di sisi lain pengembangan sistem informasi juga merupakan bagian dari proses efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintah. Pengumpulan data yang semula di mana perlu memakan waktu dan biaya dapat diringkas dan permudah dengan adanya sistem informasi. Saat ini data merupakan hal yang sangat penting, data menunjang berbagai hal di Pemerintahan baik pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.



Gambar 1. Kerangka Konsep Pemetaan Konflik Daerah Berbasis Digital untuk Menunjang Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Bali.

Sangat besarnya dampak dari konflik sosial tersebut menjadikan pengambil kebijakan harus dapat melakukan suatu manajemen terhadap data dari konflik sosial

tersebut. Pembentukan database konflik sosial melalui sistem informasi yang dibentuk akan dapat membantu dari adanya pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Pendataan konflik sosial secara digital tentunya akan mendukung dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali *Smart Island* Berlandaskan *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Pengembangan sistem informasi dipandang penting sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, di sisi lain pengembangan sistem informasi juga merupakan bagian dari proses efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintah. Pengumpulan data yang semula di mana perlu memakan waktu dan biaya dapat diringkas dan permudah dengan adanya sistem informasi. Saat ini data merupakan hal yang sangat penting, data menunjang berbagai hal di Pemerintahan baik pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.

Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Bali menjadi salah satu garda terdepan dalam hal penanganan konflik daerah, salah satunya dengan menyusun rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial, dengan rincian sebagai berikut:

- Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik.
- Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya.
- Melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini.
- Merespons secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik.
- Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang salah satu bidangnya memiliki tugas kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik data menjadi begitu penting yaitu terutama data konflik yang dikumpulkan dari kabupaten/kota. Data konflik tersebut diperlukan sebagai bahan dasar pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan terkait dengan kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik daerah. Perlu adanya digitalisasi dalam pendataan konflik di kabupaten/kota yang terbatas pada pengiriman rekap data berupa file excel. Rekap data berupa file excel yang dikirimkan memiliki beberapa kelemahan di mana file tersebut rentan hilang. Selain itu data yang diterima juga tidak secara langsung saat terjadinya konflik. Hal tersebut tentunya memiliki potensi munculnya permasalahan pendataan konflik yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Bali, seperti tumpang tindih data akibat dari pengiriman data yang tidak secara langsung, kurang akuratnya data yang diterima akibat dari kurang lengkapnya

informasi yang diterima. Permasalahan tersebut jika dibiarkan terus menerus tentunya akan menimbulkan data yang tidak valid yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan atau dasar penyusunan suatu kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

SIMPULAN

Penerapan teknologi informasi dengan pembuatan Sistem Informasi Peta Konflik atau SIPELIK akan dapat membantu dari adanya pemetaan potensi konflik yang ada di Provinsi Bali yang dapat berupa database pengelolaan data konflik. Sistem ini nantinya akan memberikan solusi pengumpulan data konflik yang dapat dilakukan secara *real time* dan lebih lengkap. Tahap-tahap dari pengembangan SIPELIK telah dilakukan dengan baik dan sesuai harapan melalui lima tahapan kegiatan. Kegiatan pertama adalah kegiatan perencanaan pengembangan SIPELIK dengan melakukan koordinasi dengan atasan langsung dan juga menerima masukan terkait dengan fitur-fitur pada SIPELIK. Kegiatan Kedua adalah kegiatan pengumpulan kebutuhan data untuk pengembangan SIPELIK dan juga melakukan proses identifikasi data. Kegiatan ketiga adalah kegiatan perancangan SIPELIK, perancangan SIPELIK dibagi menjadi tiga rancangan yaitu rancangan sistem, rancangan basis data dan juga rancangan antarmuka. Kegiatan keempat adalah kegiatan pengembangan SIPELIK. Kegiatan kelima adalah kegiatan uji coba SIPELIK.

Diharapkan SIPELIK dapat berperan dalam pengelolaan data konflik di Provinsi Bali sehingga dapat membantu mencegah dari adanya konflik di daerah. Selain itu diharapkan agar data yang dikelola dapat secara efektif, dan efisien digunakan untuk menunjang suatu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan hal tersebut karena peran penting suatu data dalam Pemerintahan memerlukan sebuah cara khusus dalam pengelolaannya. Mulai dari data yang didapatkan harus sesegera mungkin diterima sesuai dengan kondisi yang terjadi dan penyimpanan yang baik dan rapi yang akan memudahkan dalam proses pencarian.

REFERENSI

- Alma'arif, A. A. (2014). Manajemen Konflik Sosial di Indonesia (Studi pada Penanganan Konflik Sosial Keagamaan di Provinsi Banten). Jurnal Manajemen Pemerintahan, 1(1).
- Dharmika, I. B. (2019). Alih Fungsi Lahan dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Agama dan Budaya di Bali. Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan, 19(2), 21-27.

- Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 24-42.
- Juniartha, M. G. (2020). Teori Tindakan Komunikatif dalam Mengelola Konflik Sosial Masyarakat Bali. *Communicare*, 1(2).
- Kertih, W., & Susila, A. J. (2014). Kasta: Modalitas Sosial Yang Membanggakan dan Menghancurkan. In *Seminar Nasional Riset Inovatif II. Seminar Nasional Riset Inovatif II* (pp. 624-634).
- Kesumaningsari, N. P. A., & Simarmata, N. (2014). Konflik kerja-keluarga dan work engagement karyawati Bali pada bank di Bali. *Jurnal Psikologi Udayana*, 105-118.
- Mestika, Z. (2003). *Metode Penelitian Sejarah*. Padang: UNP.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Munandar, A. I. (2019). Kebijakan Dana Desa dan Konflik Sosial: Studi Kasus di Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 106-124.
- Mustamin, M. (2016). Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2(2), 185-205.
- Rosana, E. (2015). Konflik pada Kehidupan Masyarakat (Telaah mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(2), 216-230.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung.
- Suardita, I K. & Krisnawati, I G. A. A. A. (2015). Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial di Bali dari Perspektif Hukum. *Laporan Akhir Hibah Penelitian Dosen Muda Fakultas Hukum: Universitas Udayana*.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukardi. (2016). Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46 (1) pp:70-89.
- Sukardi, H. M. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara.
- Sunu, I. G. K. A. (2014). Harmonisasi, integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang multi-etnik dan multi-agama menghadapi pergeseran, pelestarian, dan konflik di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2).

Trisno, A., Indrawadi, J., Dewi, S. F., & Montessori, M. (2019). Potensi Konflik Sosial Masyarakat Nagari Padang Sibusuk dengan Desa Kampung Baru Pasca Resolusi Konflik (Potential of Community Social Conflict Padang Sibusuk with Kampung Baru Post Conflict Resolution). UPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11(2), 283-294.